

Millennium Development Goal (MDG) dan Program Pembangunan Nasional di Indonesia

Syahrial Loetan*

The adoption of the Millennium Development Goals (MDG) in the Millennium Summit in 2000 by all 189 member of the UN General Assembly was a defining moment for global cooperation in the 21st century. The MDG is global framework to face the challenges regarding human resources development in the world. In the Indonesian context, the question is "do targets and indicators contained in MDG have accorded with domestic values?. The question is relevant because the MDG will never be achieved if the MDG does not accommodate local values. Localization of the MDG is very important to synchronize the MDG and country development; hence the localization of the MDG must be first step to take in achieving MDG for each country. Refer to the recent condition in Indonesia, there are several problems in achieving MDG targets such as (i) quality of human resources, (ii) infrastructure, (iii) implementation of the decentralization, (iv) slow economy recovery, (v) law enforcement, and (vi) existence of several conflict regions. Based on those conditions, achieving the targets and indicators of MDG in Indonesia is not easy. Collective effort involving international community like donors and national community like civil society, business/private sector and Universities is a must.

I. Sejarah Singkat Human Security dan MDG

Human Security adalah konsep yang berkembang di dunia internasional mengenai keamanan manusia. Konsep ini mewacana dan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan jaman. Pada masa lalu ancaman terhadap keamanan manusia selalu di

* Penulis dilahirkan pada tanggal 17 April 1951. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik dari ITB (1976) dan Master of City Planning (MCP) di University of California, Berkeley, USA (1991), beliau meniti karir di bidang pembangunan nasional. Awal karirnya dimulai dari Departemen Pekerjaan Umum (1976-1989) kemudian di Bappenas (1991-sekarang). Jabatan yang dipercayakan pada beliau pada saat ini adalah Direktur Pendanaan Luar Negeri dan Multilateral Bappenas. Beliau banyak mencurahkan waktunya pada bidang pekerjaan umum dan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

artikan dengan ancaman dari luar negara, oleh karena itu keamanan negara difokuskan kepada “pengamanan negara” baik dari sisi perbatasan negara, masyarakat, institusi dan sistem nilai. Semua hal tersebut ditujukan untuk serangan dari luar. Hal ini masih mengemuka dengan kuat pada era perang dingin pada sekitar tahun 80-an.

Era globalisasi yang terjadi dalam dekade terakhir mengakibatkan adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam” negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat melintasi semua batasan wilayah negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Begitupun dengan “keamanan manusia”, isunya bergeser menjadi mengglobal dengan subject yang mengarah kepada individu bukan negara. Isu-isu seperti kerusakan lingkungan, polusi udara, penyebaran penyakit seperti HIV/Aids, dan terorisme internasional mendapatkan perhatian yang lebih besar sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. Praktek keamanan manusia lebih ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dalam *Human Development Report* Tahun 1994 telah mengidentifikasi dua komponen utama dari *Human Security* yaitu “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*”.

Human security yang memberi perhatian pada individu, dalam tataran praktis sangat terkait dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dalam bidang peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, sarana pendidikan dasar, kesehatan, dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung sangat menentukan seberapa besar kita dapat menjamin manusia dapat terbebas dari ketakutan dan kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu wacana mengenai *human security* berjalan seiring dengan pembangunan kerangka kerjasama pembangunan global. Pada tahun 90-an, melalui beberapa forum yang diprakarsai oleh PBB banyak memunculkan isu-isu penting yang perlu mendapatkan perhatian

bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam menentukan prioritas dari tujuan dan sasaran dalam pembangunan. Tujuan dan target dari prioritas tersebut dirumuskan dalam target-target pembangunan internasional atau dikenal sebagai *the International Development Targets (IDT)*.

Selanjutnya pada *Millennium Summit 2000* yang diikuti oleh 147 Kepala Negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millennium yang mencakup kebebasan, keamanan dan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, lingkungan hidup, hak asasi manusia dan *governance*. Deklarasi ini dikenal sebagai *Millennium Development Goals (MDG)* yang secara umum dapat menjadi kerangka untuk mengukur kemajuan pembangunan antar bangsa-bangsa, dan merupakan pengarus-utamaan tujuan dan target pembangunan secara global.

Millennium Development Goals (MDGs) memfokuskan pada 8 (delapan) tujuan-tujuan utama yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Memenuhi standar pendidikan dasar
3. Meningkatkan persamaan jender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Kesepakatan dalam mewujudkan tujuan berdasarkan indikator dan target-target kuantitatif yang telah ditetapkan, secara keseluruhan harus dicapai dalam jangka waktu 25 tahun, yaitu antara tahun 1990 s/d 2015. Target dan indikator yang telah disepakati tersebut meliputi 18 item target yang dapat diukur melalui 48 indikator.

MDGs pada dasarnya bukan sesuatu yang bersifat kaku melainkan lebih berfungsi sebagai panduan yang dapat dipakai oleh semua negara. Dalam prakteknya negara-negara berkembang

mungkin akan menetapkan standar yang lebih tinggi, sedangkan bagi negara-negara miskin mungkin banyak tujuan dan sasaran yang tampaknya sangat sulit untuk dijangkau. Bahkan di negara-negara yang relatif lebih baik keadaannyapun mungkin masih ada wilayah atau golongan yang jauh tertinggal. Untuk itu setiap negara harus melakukan proses “lokalisasi MDGs”, yaitu mengelaborasi tujuan-tujuan yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini sangat penting mengingat ada beberapa target dan indikator yang sebenarnya berbeda dengan indikator yang selama ini diterapkan di Indonesia. Misalnya adalah mengenai indikator ke 1: proporsi penduduk yang pendapatannya di bawah 1 US\$/hari, hal ini tidak dikenal di Indonesia yang selama ini mempergunakan standar konsumsi kalori minimum per hari dalam menggambarkan tingkat kemiskinan penduduknya.

Mekanisme Pelaporan¹

1. Pelaporan MDG pada tingkat internasional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada Majelis Umum setiap 5 tahun sekali (2005, 2010, dan 2015) yang berisi tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh setiap negara anggota PBB terhadap tujuan/sasaran MDG.
2. Pada tingkat nasional setiap negara memonitor/melaporkan kemajuan yang telah dicapai terhadap tujuan utama MDG terutama untuk tujuan pertama sampai dengan ke-tujuh, sedangkan untuk tujuan kedelapan akan dimonitor ditingkat global.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat ini Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *UN-Agencies* sedang menyusun laporan MDG tahun 2003 yang merupakan laporan yang pertama dari Indonesia. Laporan² ini diperkirakan akan selesai pada bulan

¹ Lihat paper *The United Nations and the MDGs: a core strategy*, 7 June 2002

Oktober 2003.

Untuk melihat seberapa jauh Indonesia dapat mencapai target-target sesuai yang tercantum dalam MDG, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu konteks ke Indonesiaan dari sudut pandang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, desentralisasi dan kesenjangan yang terjadi.

II. Konteks Pembangunan di Indonesia

Mengacu pada tujuan dan target MDGs yang menggunakan titik awal tahun 1990 sebagai tahun dasar penghitungan target dan sasaran jangka panjang, dalam konteks pembangunan ekonomi terlihat bahwa kondisi perekonomian pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 masih dalam kondisi yang stabil yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, tingkat pengangguran terkendali, dan tingkat kemiskinan menurun. Namun demikian jika dilihat dari konteks pembangunan sosial-politik ternyata pada periode yang sama terjadi permasalahan kebebasan politik, demokrasi, hak asasi manusia, penegakkan hukum, keadilan sosial, kesenjangan antar daerah, kesenjangan hubungan pusat-daerah, dan lain-lainnya yang berdampak pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat. Terjadinya krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan kontraksi yang sangat besar dalam tataran ekonomi dan sosial di Indonesia. Nilai rupiah terdepresiasi sampai dengan hampir Rp. 15.000/ 1 US\$ yang kemudian membuat sebagian besar perusahaan bangkrut akibat tidak dapat menanggung beban hutang yang sebagian besar dalam bentuk US\$. Akibatnya adalah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, dimana hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi semakin terpuruk.

² Dalam rangka penyusunan laporan MDG tahun 2003 telah dibentuk 5 kelompok kerja yang diketuai oleh wakil-wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan dan BAPPENAS.

Konteks Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi Indonesia selama 30 tahun terakhir sebelum masa krisis telah diakui dunia sebagai salah satu negara yang paling berhasil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun merupakan angka yang sangat fantastis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai berhasil tersebut ternyata kemudian terbukti kurang bertumpu pada kemampuannya sendiri. Hal ini terlihat jelas ketika krisis ekonomi melanda, kita sangat cepat jatuh dan sulit untuk bangkit kembali.

Pembangunan sistem ekonomi pada masa yang akan datang harus mendasarkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya dan pasar domestik yang sebenarnya merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus berlandaskan kepada sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kemandirian dan mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki dan tidak bergantung pada pihak yang lain. Hal ini sangat penting agar krisis ekonomi tidak kembali terulang di Indonesia.

Prioritas pembangunan dalam sistem ekonomi kerakyatan serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, dapat diidentifikasi isu lintas bidang yang meliputi empat hal sebagai berikut.

- a) Penanggulangan Kemiskinan.
- b) Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Kemitraan.
- c) Pembangunan Stabilitas Ekonomi Nasional.
- d) Pelestarian Lingkungan.

Konteks Pembangunan Sosial

Tujuan pembangunan di bidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Secara garis besar

arahan kebijakan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam GBHN 1999-2004 meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem jaminan sosial tenaga kerja, pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Peningkatan kualitas penduduk, pemberantasan perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang, dan peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang cacat.

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik, memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk pembaruan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, serta mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin.

Konteks Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia saat ini, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya untuk mengelola sumber daya alam melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya; menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan; mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap; memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menang-gulangi permasalahan lingkungan global.

Desentralisasi

Sejalan dengan UU No. 22 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan GBHN 1999-2004 secara garis besar adalah mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, melakukan pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota, dan desa, mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya, serta memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kesenjangan Antar Daerah

Dalam upaya mengatasi kesenjangan antar sektor, antar daerah, dan antara perkotaan dan perdesaan, serta dampak krisis ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan alokasi dana langsung ke daerah, meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, dan menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak akan berjalan secara optimal jika pemerintah tidak dapat memberdayakan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil dalam kegiatan

ekonomi dan disertai dengan dukungan investasi swasta untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah. Berbagai upaya peningkatan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya masyarakat kecil, telah dilakukan melalui penyediaan akses bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan kesempatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di daerah.

Kesenjangan ekonomi antar daerah masih menjadi persoalan pembangunan, terutama kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kenyataan ini dapat dilihat dari pangsa produk domestik regional bruto (PDRB) yang diberikan KBI dan KTI. Selama periode 1997-2000 rata-rata pangsa PDRB KBI sebesar 82% dibandingkan pangsa KTI sebesar 18%.

III. Pencapaian Target MDG di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Dari kondisi Indonesia pada saat ini yang dipaparkan pada bab sebelumnya dan kondisi aktual yang sedang terjadi dapat diidentifikasi beberapa tantangan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan MDG adalah antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah

Dari laporan *Human Development Report* yang dikeluarkan oleh UNDP pada bulan Juli tahun 2003 diketahui bahwa indeks pembangunan sumber daya manusia Indonesia menempati urutan ke 112 dari 175 negara. Hal ini menunjukkan bahwa tugas berat pemerintah yang paling utama adalah dalam hal membangun sumber daya manusianya. Artinya adalah keberhasilan pembangunan yang selama ini selalu digambarkan oleh angka pertumbuhan ekonomi perlu segera dikoreksi. Pemerataan pembangunan dan indeks pembangunan sumber daya manusia menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Sektor-sektor terkait dengan pembangunan sumber daya

manusia seperti pendidikan dan kesehatan harus mendapatkan prioritas yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Ketidakmerataan Pembangunan antar Propinsi

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai kesenjangan antar daerah di Indonesia, terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional selama ini lebih difokuskan pada wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini banyak menimbulkan ketidakpuasan di beberapa daerah yang merasa dirinya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satu jawaban untuk mengatasi hal tersebut, namun demikian sampai saat ini pelaksanaannya masih dirasakan banyak kekurangan. Dalam hal pencapaian target MDG hal tersebut menjadi satu kendala tersendiri. Pencapaian target MDG tidak mungkin hanya berlandaskan pada program dari Pemerintah Pusat saja melainkan harus datang dari inisiatif Pemerintah Daerah juga yang pada saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam membangun daerahnya masing-masing. Permasalahannya adalah kembali kepada ketidakmerataan kemampuan dari Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan target-target dalam MDG. UNSFIR³ pada tahun 2002 telah menganalisis proporsi pencapaian MDG oleh propinsi-propinsi di Indonesia sebagai berikut:

Target	Number of provinces that will fail to attain targets by 2015
50% reduction in income poverty	17
100% primary net enrolment	16
100% adult literacy rate	8
No gender disparities in primary and secondary education	12
2/3 reduction in infant mortality	1

³ *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery*, proyek hibah yang dibiayai UNDP yang bertujuan untuk membantu Indonesia bangkit dari krisis ekonomi dan membangun kerangka pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Data di atas diambil dari paper: *Formulating a Strategic Approach to Poverty Reduction: from Global Framework to an Indonesian Agenda*, Iyanatul Islam.

4/5 reduction in maternal mortality	6
Universal access to safe drinking water	24
Universal access to shelter of minimum quality	10

Kondisi di atas menjadikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk dapat mensosialisasikan tujuan-tujuan dalam MDG kepada Pemerintah Daerah dan bersama-sama bekerja untuk mencapainya. Pencapaian MDG bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah melainkan juga komponen-komponen masyarakat yang lain seperti LSM, perguruan tinggi dan komponen lainnya. MDG akan menjadi alat yang efektif untuk membangun sumber daya manusia dengan lebih terarah apabila hal tersebut disadari sebagai satu kebutuhan bersama untuk membangun dan bukan sekedar dokumen internasional. Pemerintah Pusat harus melakukan sosialisasi yang intensif ke daerah dan membangun kerjasama antar daerah dan lintas sektoral dalam rangka pencapaian MDG tersebut. Daerah-daerah yang sekiranya diidentifikasi akan kesulitan mencapai target MDG harus dibantu sedemikian rupa sehingga dapat mencapai target bersama-sama dengan daerah yang lainnya.

3. Kondisi Politik dan Keamanan di beberapa Daerah yang Belum Kondusif

Adanya konflik di beberapa daerah mengakibatkan beberapa permasalahan yaitu: pembiayaan untuk memadamkan konflik tersebut dan menimbulkan image yang kurang baik di dunia internasional. Konflik tersebut juga berakibat langsung pada kondisi sosial budaya masyarakat. Perusakan terhadap sarana dan prasarana dasar merupakan hal yang biasa terjadi dan hal ini sangat mempengaruhi pada penurunan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Trauma yang dirasakan tidak akan begitu saja hilang setelah konflik selesai. Semua pihak harus bekerjasama untuk berusaha membangun kembali daerah tersebut dan berusaha menjaga agar konflik serupa tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

4. Sarana dan Prasarana yang Masih Belum Memadai

Pembangunan sumber daya manusia yang optimal membutuhkan adanya sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan,

kesehatan, dan transportasi yang memadai. Hal ini menjadi tantangan karena tidak di semua daerah di Indonesia tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Untuk menyediakan sarana dan prasarana yang belum ada dan memperbaiki yang sudah ada agar lebih memadai dibutuhkan biaya yang sangat besar dan berkesinambungan dan untuk kondisi keuangan negara pada saat ini, hal ini dirasakan cukup berat.

5. Kondisi Ekonomi yang Belum Pulih Sepenuhnya

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih seperti sebelum krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan para investor belum sepenuhnya percaya untuk berinvestasi kembali di Indonesia. Akibatnya adalah masing tingginya angka pengangguran dan masih rendahnya angka pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2005, APBN diperkirakan masih dalam kondisi defisit. Hal ini mengakibatkan anggaran untuk pembangunan harus ditekan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu membebani anggaran belanja negara. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan yang akan dilaksanakan harus benar-benar memiliki prioritas yang tinggi dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia.

Tabel Realisasi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro

Indikator	Realisasi			Proyeksi			
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Laju Inflasi	9,4	12,5	10	7 - 9	6 - 8	6 - 8	6 - 7
Pengangguran terbuka (%) thd angkatan kerja	6,1	8,1	9,1	9,8	10,3	10,4	10,2
Surplus/defisit APBN/PDB (%)	-1,6	-2,8	-1,7	-1,8	-1,1	0	0,8
Pertumbuhan ekonomi	4,9	3,3	3,7	3,5 - 4	4 - 5	4,5 - 5,5	5 - 6

Sumber data : REPETA 2004

6. Lemahnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Salah satu yang menyebabkan kita sangat sulit untuk bangkit dari krisis ekonomi adalah masih maraknya korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN) disemua aspek baik pemerintah maupun swasta. Dalam upaya memerangi KKN, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas terhadap semua pelaku KKN tanpa pandang bulu. Penegakan sistem hukum yang baik juga sangat tersangkut pada menekan angka kriminalitas yang terjadi. Selama hal ini belum dapat dilaksanakan dan akibatnya adalah masih banyaknya terjadi kebocoran sehingga sangat berpengaruh pada pencapaian hasil pembangunan selama ini.

IV. Perlunya Komitmen Internasional Untuk Membantu Negara Miskin dan Berkembang Dalam Upaya Mencapai MDG

Tujuan kedelapan MDG adalah perlunya mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan dalam rangka pencapaian MDG. Artinya bahwa telah disadari dari awal bahwa dalam upaya pencapaian MDG terutama bagi negara miskin dan berkembang diperlukan adanya bantuan keuangan dari negara maju. Kemitraan baik secara bilateral maupun multilateral harus selalu dikembangkan untuk saling bekerjasama satu sama lain.

Ide awal yang mengusulkan agar setiap negara maju memberikan sebesar 0,7% dari GNP nya mulai muncul sekitar tahun 1969 seperti tertuang dalam Laporan Pembangunan Internasional yang dipelopori oleh Lester Pearson, Perdana Menteri Kanada. Hal ini kemudian diadopsi secara resmi melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1970 sebagai bagian dari strategi pembangunan internasional.

Selanjutnya pada konferensi mengenai Pendanaan Pembangunan di Monterrey, Meksiko pada tahun 2002, masyarakat internasional sudah menyepakati untuk secara bersama menambah bantuannya kira-kira sebesar US\$ 16 milyar. Masing-masing negara maju memberikan komitmennya sebagai berikut:

- a. Amerika Serikat akan melipatgandakan bantuannya sampai dengan hampir US\$ 15 milyar setahun pada tahun 2006.
- b. Uni Eropa akan meningkatkan bantuannya sampai dengan 0,39% dari GNP pada tahun 2006.

- c. Negara-negara maju yang lain seperti Austria, Inggris, Belgia, Prancis, Jerman, Yunani dan lain-lain) juga memberikan komitmen untuk menaikkan porsi bantuannya sampai dengan 0,33% - 1% dari *gross national income (GNI)* nya.

Pembiayaan tersebut disalurkan baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral.

Kerjasama Luar Negeri Di Indonesia

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003 posisi pinjaman luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Kreditor	Jumlah Proyek	Besar pinjaman (US\$ juta)
A.	Multilateral		
	1. Asian Development Bank (ADB)	51	4,408.27
	- Project loan	48	3,558.27
	- Program loan	3	850
	2. World Bank	36	2,742.70
	- Project loan	35	2,442,70
	- Program loan	1	300
	3. Multilateral lain	15	363.08
	- EIB	1	104,76
	- IDB	10	152,16
- IFAD	3	65.51	
- Kuwait Fund	1	40,65	
B.	Bilateral		
	1. JBIC	55	5,393.21
	- Project loan	54	4,558.81
	- Program loan	1	834.40
	2. Austria	3	61.29
	3. Belanda	2	58.07
	4. Jerman	9	235.65
	5. Korea	2	69,97
6. Perancis	4	99.06	
7. Spanyol	2	46.32	

	FKE	100	1.202,77
	Total	279	14,680.40
	- Program loan	5	1,984.40
	- Project loan	274	12,696.00

Isu-isu yang menjadi perhatian lembaga/negara donor pada prinsipnya sudah dapat mengakomodasi tujuan-tujuan dalam MDG. Ilustrasinya adalah sebagai berikut:

- a. *World Bank*; berdasarkan *Country Assistance Strategy (CAS) 2001 – 2003* melandaskan kerjasamanya pada bidang-bidang sebagai berikut:
 - Pemulihan ekonomi (pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur serta peningkatan daya saing usaha).
 - *Good governance* (reformasi hukum dan peradilan, manajemen keuangan negara, sistem pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan otonomi daerah).
 - Peningkatan pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat miskin.
- b. *Asian Development Bank (ADB)*; berdasarkan *Country Strategy and Program (CSP) 2003–2005*, kerjasama ADB memfokuskan pada:
 - Peningkatan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.
 - Sinergi pembangunan daerah perkotaan dan perdesaan.
 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan, kesehatan dan kesetaraan jender.
 - Lingkungan hidup.
 - Pengurangan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
- c. *European Union*: berdasarkan *Country Strategy Paper (CSP) 2002–2006*, kerjasama Uni Eropa di Indonesia memfokuskan pada:
 - Pelaksanaan *good governance*.

- Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaksanaan otonomi daerah.
- Pengentasan kemiskinan dan penyediaan kebutuhan dasar.
- Mengurangi gejala sosial dan keresahan masyarakat.

d. *United Nations Development Programme (UNDP)*; berdasarkan *Country Cooperation Framework (CCF) 2001 – 2005* fokus kerjasama UNDP di Indonesia adalah:

- Reformasi tata pemerintahan.
- Pengentasan kemiskinan.
- Pemulihan dan penanggulangan konflik
- Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Perincian di atas hanya berupa ilustrasi dalam upaya menggambarkan perhatian lembaga donor dalam pelaksanaan kerjasamanya di Indonesia. Untuk lembaga/negara donor yang lain dapat dikatakan tidak terlalu jauh berbeda seperti yang telah diuraikan diatas.

Secara teknis, dalam semua proses pembahasan proyek yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri pada saat ini berlandaskan pada dokumen *country strategy* dari masing-masing lembaga/negara donor dan dokumen perencanaan nasional yang sedang berlaku yaitu Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang notabene kesemua hal tersebut sudah cukup banyak mengakomodasikan tujuan-tujuan dalam MDG seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan jender, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan.

Penyusunan laporan MDG tahun 2003 memiliki peranan yang strategis dalam upaya lebih mempersatukan pandangan antara pemerintah dan lembaga/negara donor dalam pencapaian MDG. Laporan tersebut pada prinsipnya akan menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan dan kecenderungan;
- b. Tantangan; dan
- c. Kebijakan dan program

Dari laporan MDG tersebut diharapkan dapat diidentifikasi program-program kerjasama yang dapat dilakukan dan estimasi pendanaan yang diperlukan dalam mencapai target-target MDG.

IV. Penutup dan Kesimpulan

1. Perhatian dunia kepada subjek individu yang kemudian melahirkan mengembangkan konsep *Human Security* dan *Human Development* telah mengejawantah melalui komitmen-komitmen internasional. Salah satunya adalah *Millennium Development Goals (MDG)* hasil dari *Millennium Summit* pada tahun 2000.
2. MDG telah merinci tujuan-tujuan pembangunan sumber daya manusia kepada target-target dan indikator yang terukur sampai dengan 2015.
3. Pencapaian MDG di negara-negara miskin dan berkembang telah disadari sangat sulit tanpa adanya bantuan yang diberikan oleh negara maju.
4. Konferensi pembangunan di Monterrey, Meksiko pada tahun 2002 merupakan salah satu upaya untuk menarik komitmen dari negara-negara maju untuk memperbesar porsi bantuan yang diberikannya kepada negara miskin dan berkembang.
5. Dalam konteks Indonesia dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan yang tercantum dalam MDG sudah banyak terdapat didalam dokumen-dokumen landasan pembangunan seperti PROPENAS dan REPETA, namun demikian dengan adanya MDG akan semakin memperkuat dan menyatukan pandangan antara pemerintah dan lembaga/negara donor dalam menjalankan kerjasamanya dengan hasil yang lebih terukur secara global.
6. Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini mencerminkan bahwa pencapaian target MDG bukanlah hal yang mudah. Cukup banyak kendala yang dihadapi seperti indeks pembangunan sumber daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana dasar yang belum memadai,

- perekonomian yang belum pulih sepenuhnya dan pelaksanaan otonomi daerah yang belum optimal.
7. Laporan MDG tahun 2003 yang merupakan laporan pertama Indonesia diharapkan dapat menjadi satu landasan dalam memperkuat kerjasama antar semua komponen untuk bersama-sama bekerja mencapai tujuan MDG.
 8. Dalam upaya pencapaian MDG di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan harus melibatkan semua komponen yang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

Referensi :

1. Formulating A Strategic Approach to Poverty Reduction : From A Global Framework to An Indonesian Agenda, Iyanatul Hasanah, UNSFIR, 2002
2. Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A Compact among nations to end human poverty, UNDP, 2003;
3. Human Security Now: Protecting and Empowering People, Commission on Human Security, United Nations, 2003
4. Indonesia Country Cooperation Framework – UNDP 2001 – 2005;
5. Indonesia Country Assistance Strategy (CAS) World Bank 2001 – 2003;
6. Indonesia Country Strategy and Program (CSP) 2003 – 2005, Asian Development Bank;
7. Indonesia Country Strategy Paper (CSP) 2002 – 2006 & National Indicative Programme 2002 – 2004, European Commission.
8. Laporan Pemantauan Proyek Pinjaman Luar Negeri, BAPPENAS, Juli 2003
9. Program Pembangunan nasional (PROPENAS) 2000 – 2004;
10. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) tahun 2004;
11. The United Nations and the MDGs : a core strategy, June, 2002
12. UN ESCAP/UNDP Initiative for the Achievement of Millennium Development Goals in Asia and the Pacific, Millennium Development Goals: Lessons, Opportunities and Challenges, UN ESCAP, 2002

—oooOOooo—